



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memasuki tahun kelima dalam rentang waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 guna mewujudkan visi dan misi yang telah disiapkan dalam masa pembangunan lima tahun.

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap kepala satuan perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana kerja satuan perangkat daerah yang sesuai dengan tupoksi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman pada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Rencana Strategi Sekretariat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun anggaran diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengingat bahwa :

- a. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-OPD hasil evaluasi

- pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- b. Rencana Renja OPD memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 - c. Rancangan Renja OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antara pemangku kepentingan dalam rangka menentukan prioritas sub kegiatan yang mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah.
 - d. Rancangan Renja OPD akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD, karena Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar rancangan RENJA-OPD dan antar RKPD Kabupaten/Kota.
 - e. Rancangan Renja OPD walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RKPD namun tetap bahwa RENJA-OPD sebagai bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Selain itu RENJA-OPD juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan. Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI disertai alokasi biayanya yang tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA-OPD, karena RENJA-OPD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4422);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Tentang tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Setda Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Setda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 kedalam rencana program, kegiatan Sub Kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan renja sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana strategi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Menyediakan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Memberikan pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 adalah Sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan (2) Dasar Hukum (3) Maksud dan Tujuan (4) Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, memuat uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Program kegiatan dan sub kegiatan memuat penjelasan mengenai faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai

rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan, tabel rencana program kegiatan dan sub kegiatan (perumusan program kegiatan dan sub kegiatan).

BAB V Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2020
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten yaitu 1) Asisten Bidang Pemerintahan yang membawahi Biro Tata Pemerintahan dan Biro Hukum; 2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Kesejahteraan Rakyat; dan 3) Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi Biro Organisasi dan Tatalaksana dan Biro Umum Perlengkapan dan Protokol.

Ringkasan jumlah anggaran belanja di sekretariat daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
 Belanja Daerah di Sekretariat Daerah
 Triwulan IV Tahun Anggaran 2020

No	Biro	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1	Biro Tata Pemerintahan	17.546.300.000	17.349.738.494	196.561.506	98,88
2	Biro Hukum	1.834.402.640	1.781.321.523	53.081.117	97,11
3	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan	2.992.923.430	2.952.169.373	38.910.885	98,31
4	Biro Kesejahteraan Rakyat	3.826.641.920	3.748.852.036	77.789.884	97,96
5	Biro Organisasi dan Tatalaksana	1.839.999.870	1.774.795.202	65.204.668	96,46
6	Biro Umum Perlengkapan dan Protokol	81.734.495.507	79.200.735.332	79.200.735.332	96,90

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 berjumlah 8 Program dan 29 Kegiatan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2020 masing – masing biro dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Tabel Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Kegiatan			Ket. Biro
		Rencana	Realisasi	%	
I.	Biro Tata Pemerintahan	17.546.300.000	17.349.738.494	98,88	Biro Tapem
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.217.093.645	1.203.811.244	98,91	Biro Tapem
1.1	Penyediaan alat tulis kantor	89.999.020	86.698.120	96,33	Biro Tapem
1.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.839.900	44.509.200	97,10	Biro Tapem
1.3	Penyediaan makanan dan minuman	147.750.000	140.774.000	95,28	Biro Tapem
1.4	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	235.196.000	235.022.932	99,93	Biro Tapem
1.5	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke	504.444.625	504.302.892	99,97	Biro Tapem

	Dalam Daerah				
1.6	Penyusunan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan	193.864.100	192.504.100	99,30	Biro Tapem
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	120.621.600	92.139.250	76,39	Biro Tapem
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	87.931.600	62.099.250	70,62	Biro Tapem
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32.690.000	30.040.000	91,89	Biro Tapem
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.623.600	31.623.600	100	Biro Tapem
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	31.623.600	31.623.600	100	Biro Tapem
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	51.130.500	48.727.200	95,30	Biro Tapem

	Capaian Kinerja dan Keuangan				
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.169.000	36.765.700	93,86	Biro Tapem
4.2	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	4.310.800	4.310.800	100	Biro Tapem
4.3	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	7.650.700	7.650.700	100	Biro Tapem
5.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	98.352.435	98.346.435	99,99	Biro Tapem
5.1	Pelaksanaan Kerjasama Daerah	89.166.435	89.160.435	99,99	Biro Tapem
5.2	Inventarisasi Kerjasama antar Daerah dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	9.186.000	9.186.000	100	Biro Tapem
6.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	33.265.900	33.265.900	100	Biro Tapem

6.1	Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru	33.265.900	33.265.900	100	Biro Tapem
7.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	15.488.390.840	15.337.458.065	99,03	Biro Tapem
7.1	Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan	24.675.000	24.544.300	99,47	Biro Tapem
7.2	Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	23.547.000	23.279.000	98,86	Biro Tapem
7.3	Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan	24.160.140	23.964.140	99,19	Biro Tapem
7.4	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan	15.232.830.000	15.193.904.000	99,74	Biro Tapem
7.5	Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	49.517.000	47.580.400	96,09	Biro Tapem
7.6	Persertifikatan Tanah	133.661.700	24186225	18,10	Biro Tapem

8.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	180.889.720	179.955.500	99,48	Biro Tapem
8.1	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	180.889.720	179.955.500	99,48	Biro Tapem
9.	Program Fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	280.281.360	279.761.000	99,81	Biro Tapem
9.1	Rapat Kordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak	263.856.460	263.336.100	99,80	Biro Tapem
9.2	Administrasi Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pada	16.424.900	16.424.900	100	Biro Tapem

	hasil pilkada				
10.	Program peresmian, pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota	14.475.000	14.474.900	100	Biro Tapem
10.1	Pengelolaan Administrasi PAW DPRD Provinsi dan Kabupaten	14.475.000	14.474.900	100	Biro Tapem
11.	Program Pembinaan Wilayah	2.237.000	2.237.000	100	Biro Tapem
11.1	Rapat Koordinasi Bidang Bina Admistrasi Kewilayahan	2.237.000	2.237.000	100	Biro Tapem
12.	Program Layanan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi	27.938.400	27.938.400	100	Biro Tapem
12.1	Rapat Koordinasi Penataan Batas Wilayah	16.559.400	16.559.400	100	Biro Tapem

12.2	Inventarisasi Rupabumi Unsur Buatan di Provinsi Sulawesi Barat	16.559.400	16.559.400.	100	Biro Tapem
	Biro Hukum	1.834.402.640	1781.321.523	97,11	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	924.079.880	901.372.083	97,54	Biro Hukum
1.1	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	240.780.000	240.130.423	99,73	Biro Hukum
1.2	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	241.358.640	240.482.810	99,64	Biro Hukum
1.3	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Pegawai	441.941.240	420.758.850	95,21	Biro Hukum
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.135.000	70.406.820	90,11	Biro Hukum
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala	78.135.000	70.406.820	90,11	Biro Hukum

	kendaraan dinas/operasional				
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.810.600	34.155.900	81,69	Biro Hukum
3.1	Pembuatan Laporan Penatausahaan Keuangan dan Asset	41.810.600	34.155.900	81,69	Biro Hukum
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	409.723.300	403.189.500	98,41	Biro Hukum
4.1	Koordinasi rencana aksi nasional Hak asasi manusia	64.968.800	63.987.800	98,49	Biro Hukum
4.2	Penanganan Penyelesaian Perkara Litigasi	285.181.500	282.029.750	98,89	Biro Hukum
4.3	Penanganan Perkara pada Kasus Non	59.573.000	57.171.950	95,97	Biro Hukum

	Litigasi				
5	Program Penataan Perundang-undangan	257.835.940	252.110.220	97,78	Biro Hukum
5.1	Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat	75.404.900	72.143.650	95,68	Biro Hukum
5.2	Program Pembentukan Peraturan Daerah	23.452.060	23.424.300	99,88	Biro Hukum
5.3	Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya	83.818.560	82.347.770	98,25	Biro Hukum
5.4	Harmonisasi dan pembahasan peraturan Gubernur	75.160.420	74.194.500	98,71	Biro Hukum
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	122.817.920	120.087.000	97,78	Biro Hukum
6.1	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov.	57.034.820	55.945.750	98,09	Biro Hukum

	Sulawesi Barat				
6.2	Pengundangan dan autentifikasi Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat	65.783.100	64.141.250	97,50	Biro Hukum
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	456.036.101	450.534.621		Biro Ekbang
1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.000.000	8.071.400	89,68	Biro Ekbang
1.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.371.800	38.347.000	99,94	Biro Ekbang
1.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.156.275	15.109.900	99,69	Biro Ekbang
1.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.390.000	16.948.000	97,46	Biro Ekbang
1.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	58.958.000	58.881.000	99,87	Biro Ekbang
1.6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	175.909.600	172.746.571	98.20	Biro Ekbang

	Daerah				
1.7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	96.250.426	96.237.000	99,99	Biro Ekbang
1.8	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai	45.000.000	44.193.75	98,21	Biro Ekbang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88.273.100	88.152603		Biro Ekbang
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.858.000	9.858.000	100	Biro Ekbang
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71.870.000	71.764.503	99,85	Biro Ekbang
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.545.100	6.530.100	99,77	Biro Ekbang
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-		Biro Ekbang

3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	-	Biro Ekbang
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.000.000	8.000.000		Biro Ekban g
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8.000.000	8.000.000		Biro Ekbang
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	127.245.500	124.731.600		Biro Ekban g
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.072.600	80.891.950	99,78	Biro Ekbang
5.2	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD	46.172.900	43.839.650	94,95	Biro Ekbang
5.3	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	-	-	-	Biro Ekbang
6	Program Peningkatan	139.813.900	132.290.150		Biro Ekban

	Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah				g
6.1	Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) Se- Sulbar	65.775.720	58.784.200	89,37	Biro Ekbang
6.2	Pengembangan Sistem e-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	54.858.200	54.326.950	99,03	Biro Ekbang
6.3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	19.179.980	19.179.000	99,99	Biro Ekbang
7	Program Penguatan Ekonomi Daerah	323.639.304	313.366.401		Biro Ekban g
7.1	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Prov. Sulbar	82.989.000	82.716.000	99,67	Biro Ekbang
7.2	Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan BUMD	73.163.504	70.994.351	97,04	Biro Ekbang
7.3	Penyediaan Administrasi Tim Pengendali Inflasi	69.670.400	63.034.400	90,48	Biro Ekbang

	Prov. Sulbar				
7.4	Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (High Level Meeting)	28.507.400	28.507.400	100	Biro Ekbang
7.5	Penyedia Administrasi TPAKD Prov. Sulbar	69.309.000	68.114.250	98,28	Biro Ekbang
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1.849.915.525	1.835.093.998		Biro Ekban g
8.1	Koordinasi Dalam Pendampingan dan Perlindungan Hukum Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	201.379.800	198.061.500		Biro Ekbang
8.2	Penataan Administrasi Layanan Pengadaan	447.448.000	437.846.368	97,85	Biro Ekbang
8.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1.050.643.925	1.049.791.430	99,92	Biro Ekbang

8.4	Penyusunan Katalog Elektronik Lokal	74.564.000	73.514.900	98,59	Biro Ekbang
8.5	Workshop Penyusunan dan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	75.879.800	75.879.800	100	Biro Ekbang
II.	Biro Kesejahteraan Rakyat	3.826.641.920	3.748.852.036	97,96	Biro Kesra
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	843.520.680	843.334.949	99,98	Biro Kesra
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	444.550.000	444.550.000	100	Biro Kesra
1.2	Penyediaan Alat Tulis kantor	64.848.780	64.848.780	100	Biro Kesra
1.3	Penyediaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	100	Biro Kesra
1.4	Penyediaan makan dan minum	39.744.000	39.743.000	100	Biro Kesra
1.5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	154.098.800	154.096.826	100	Biro Kesra
1.6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	135.279.100	135.096.343	99,86	Biro

	dalam daerah				Kesra
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.390.000	85.452.595	97,78	Biro Kesra
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opesional	87.390.000	85.452.595	97,78	Biro Kesra
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	5.000.000	4.000.000	80,00	Biro Kesra
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	5.000.000	4.000.000	80,00	Biro Kesra
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.534.400	20.534.400	80,00	Biro Kesra
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.600.000	1.600.000	100	Biro Kesra
4.2	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	1.600.000	1.600.000	100	Biro Kesra
4.3	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP	3.532.800	3.532.800	100	Biro

	dan LPPD				Kesra
4.4	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	6.900.800	6.900.800	100	Biro Kesra
4.5	Penyusunan RKAP/DPPA SKPD	6.900.800	6.900.800	100	Biro Kesra
5.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan	167.284.520	167.017.900	99,84	Biro Kesra
5.1	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Hibah/bansos Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan	167.284.520	167.017.900	99,84	Biro Kesra
6.	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	2.702.912.320	2.628.512.192	97,25	Biro Kesra
6.1	Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi	1.020.270.920	1.020.001.400	99,97	Biro Kesra
6.2	Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Nasional	1.626.529.400	1.552.464.792	95,45	Biro Kesra

6.3	Verifikasi Hbah Bansos Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan lainnya	56.112.000	56.046.000	99,88	Biro Kesra
	BIRO ORTALA	1.839.999.870	1.774.795.202	96,46	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	467.636.450	455.193.697		Biro Ortala
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	105.000.000	93.750.000	89,29	Biro Ortala
1.2	Penyediaan alat tulis kantor	31.938.300	31.789.000	99,53	Biro Ortala
1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.989.350	29.900.000	99,70	Biro Ortala
1.4	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.630.600	3.617.600	99,64	Biro Ortala
1.5	Penyediaan makanan dan minuman	37.770.000	37.770.000	100	Biro Ortala
1.6	Rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	155.828.000	155.682.917	99,91	Biro Ortala
1.7	Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	103.480.200	102.684.180	99,23	Biro Ortala

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	69.491.700	64.406.952		Biro Ortala
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	69.491.700	64.406.952	92,68	Biro Ortala
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	146.400.000	146.400.000		Biro Ortala
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	146.400.000	146.400.000	100	Biro Ortala
4	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	42.772.670	36.652.400		Biro Ortala
4.1	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan SP4N (Sistem Pengelolaan	13.807.170	9.223.900	66,81	Biro Ortala

	Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Pemprov. Sulbar				
4.2	Supervisi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat	28.969.500	27.428.500	94,68	Biro Ortala
5	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	230.801.800	203.690.350		Biro Ortala
5.1	Workshop dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	110.199.200	86.315.900	78,33	Biro Ortala
5.2	Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	120.602.600	117.374.450	97,32	Biro Ortala
6	Program Penataan Tata Laksana	277.398.570	270.435.443		Biro Ortala
6.1	Evaluasi penerapan SOP Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah	106.772.820	104.953.100	98,30	Biro Ortala

	Provinsi Sulawesi Barat				
6.2	Penyusunan Road Map RB 2020 2025 Provinsi Sulawesi Barat	128.674.900	127.778.143	99,30	Biro Ortala
6.3	Evaluasi Pelaksanaan RB Provinsi Sulawesi Barat	24.367.250	20.120.600	82,57	Biro Ortala
6.4	Evaluasi Peta Proses Bisnis Lingkup Pemprov. Sulbar	17,583.600	17.583.600	100	Biro Ortala
7	Program Manajemen Sumber Daya Manusia	274.560.830	274.359.980		Biro Ortala
7.1	Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Se Sulawesi Barat	70.093.950	69.928.600	99,76	Biro Ortala
7.2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan perangkat daerah se Prov Sulawesi Barat	56.310.500	56.275.000	99,94	Biro Ortala
7.3	Penataan Administrasi KGB,KP, dan Pensiun Lingkup Setda Prov.	148.156.380	148.156.380	100	Biro Ortala

	Sulbar				
8	Program Penguatan Organisasi	330.933.850	323.656.380		Biro Ortala
8.1	Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	94.287.722	94.135.252	99,84	Biro Ortala
8.2	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	75.000.000	67.875.000	90,50	Biro Ortala
8.3	Sosialisasi perundang undangan tentang organisasi perangkat daerah	33.239.318	33.239.318	100	Biro Ortala
8.4	Pendampingan tentang Tata Cara Penyusunan Budaya Kerja Perangkat Daerah	128.406.810	128.406.810	100	Biro Ortala
	BIRO UMUM	81.734.495.507	79.200.735.332	96,90	Biro Umum
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	38.902.142.057	37.256.350.172	95,77	Biro Umum

1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	303.109.720	299.945.840	98,96	Biro Umum
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.078.757.880	2.002.936.092	96,35	Biro Umum
1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	617.304.500	596.158.110	96,57	Biro Umum
1.4	Penyediaan makanan dan minuman	11.346.287.887	11.345.935.600	100	Biro Umum
1.5	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.359.800.160	1.359.708.007	99,99	Biro Umum
1.6	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	421.290.600	421.117.200	99,96	Biro Umum
1.7	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	26.404.900	26.404.900	100	Biro Umum
1.8	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai	340.483.700	325.265.400	95,53	Biro Umum
1.9	Pengelolaan Administrasi Tata	1.326.324.020	1.081.638.475	81,55	Biro

	Usaha Sekretariat Daerah				Umum
1.10	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Gubernur	2.221.498.240	2.121.783.981	95,51	Biro Umum
1.11	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Wakil Gubernur	1.004.981.900	712.047.428	70,85	Biro Umum
1.12	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Asisten Sekretaris Daerah	1.512.293.400	1.124.258.685	74,34	Biro Umum
1.13	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Para Staf Ahli Gubernur	1.618.024.720	1.332.597.014	82,36	Biro Umum
1.14	Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan	8.680.596.860	8.651.523.670	99,67	Biro Umum
1.15	Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat	5.951.044.410	5.762.021.670	96,82	Biro Umum
1.16	Penataan Kearsipan Lingkup Biro Umum dan Perlengkapan	93.939.160	93.008.100	99,01	Biro Umum
2	Program	30.687.443.320	29.921.127.018	97,50	Biro

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Umum
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.217.081.000	6.091.570.000	97,98	Biro Umum
2.2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1.102.185.144	1.041.940.130	99,91	Biro Umum
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.049.071.000	1.041.940.130	99,32	Biro Umum
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.891.452.500	1.878.949.600	99,34	Biro Umum
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	2.132.364.500	2.132.285.500	100	Biro Umum
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.590.024.000	6.539.794.980	99,24	Biro Umum
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1.577.070.000	1.379.419.308	87,47	Biro Umum
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala	3.534.210.000	3.200.541.561	90,56	Biro Umum

	kendaraan dinas/operasional				
2.9	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.197.849.856	1.180.413.733	98,54	Biro Umum
2.10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	970.880.820	960.794.142	98,96	Biro Umum
2.11	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung VIP Room Bandara	1.035.254.500	1.024.800.714	98,99	Biro Umum
2.12	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	1.295.000.000	1.294.461.500	99,96	Biro Umum
2.13	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	2.095.000.000	2.094.969.500	100	Biro Umum
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	238.581.000	238.570.866	100	Biro Umum
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	238.581.000	238.570.866	100	Biro Umum

4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.911.568.010	2.870.159.218	98,58	Biro Umum
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	148.690.320	148.644.220	99,97	Biro Umum
4.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	22.264.360	22.234.360	99,87	Biro Umum
4.3	Penyusunan laporan keuangan triwulanan	50.312.600	50.312.600	100	Biro Umum
4.4	Pengelolaan Gudang dan Pendistribusian Barang	268.523.500	267.463.210	99,61	Biro Umum
4.5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program	312.480.280	302.920.050	96,94	Biro Umum
4.6	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa Lingkup Biro Umum dan Perlengkapan	387.565.640	386.848.477	99,81	Biro Umum

4.7	Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara Sekretariat	216.051.800	215.320.650	99,66	Biro Umum
4.8	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	289.075.920	289.075.920	100	Biro Umum
4.9	Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara KDH dan WKDH	41.388.200	41.388.200	100	Biro Umum
4.10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	89.241.200	89.241.200	100	Biro Umum
4.11	Monitoring Penggunaan Barang dan Pemanfaatan Barang	372.337.380	352.790.100	94,75	Biro Umum
4.12	Penyusunan HPS dan Pengadministrasian Dokumen Proses Pengadaan	404.490.390	396.421.451	98,01	Biro Umum
4.13	Penatausahaan PPK SKPD	154.116.520	153.896.920	99,86	Biro Umum
4.14	Konsolidasi Sekretariat Daerah Pemerintah	63.654.600	63.649.800	99,99	Biro

	Provinsi Sulawesi Barat				Umum
4.15	Elektronisasi Pencatatan dan Pendataan Barang	91.375.300	89.952.060	98,44	Biro Umum
5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	8.994.761.120	8.914.528.058	99.11	Biro Umum
5.1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	3.986.813.500	3.986.685.660	100	Biro Umum
5.2	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	2.754.829.960	2.754.472.020	99,99	Biro Umum
5.3	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	913.077.080	859.154.158	94,09	Biro Umum
5.4	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	381.451.680	361.284.660	94,71	Biro Umum

5.5	Pelayanan Kedinasan Protokoler	958.588.900	952.931.560	99,41	Biro Umum
-----	--------------------------------	-------------	-------------	-------	-----------

2.2. Rencana dan Realisasi Output (Keluaran) Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur			Ket
		Output (keluaran)	Rencana %	Realisasi	
I.	Biro Tata Pemerintahan	Persentase Outcome dan Output	100	96,85	Biro Tapem
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	98,74	Biro Tapem
1.1	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang dibeli	40	40	Biro Tapem
1.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	39.827	38,703	Biro Tapem
1.3	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dos makanan yang dibeli	1.636	1,558	Biro Tapem
1.4	Rapat-Rapat	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diikuti	13	13	Biro Tapem

	Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				
1.5	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumah perjalanan dinas dalam daerah yang diikuti	54	54	Biro Tapem
1.6	Penyusunan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan dan ketatausahaan yang tersusun	3	3	Biro Tapem
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	40,00	Biro Tapem
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	10	2	Biro Tapem
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Jumlah service peralatan gedung kantor	4	4	Biro Tapem

	kantor				
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	100	Biro Tapem
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	6	6	Biro Tapem
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan	100	100	Biro Tapem
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	3	100	Biro Tapem
4.2	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD yang tersusun	2	100	Biro Tapem
4.3	Penyusunan RKA-	Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA SDKP	2	100	Biro Tapem

	P/DPPA-SKPD				
5.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya kerjasama daerah untuk meningkatkan produktifitas pemerintah provinsi sulawesi barat	100	100	Biro Tapem
5.1	Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan kerjasama daerah yang terlaksana	1	1	Biro Tapem
5.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase pelayanan urusan pertanahan	100	50,00	Biro Tapem
5.1	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah luas tanah yang dibebaskan	15	15	Biro Tapem
5.2	Persertifikatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan	1	0	Biro Tapem
6.	Program	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan	100	100	Biro Tapem

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	pembangunan daerah			
6.1	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	80	100	Biro Tapem
7.	Program Fasilitas pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah	100	100,00	Biro Tapem
7.1	Rapat Kordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pilkada serentak	4	4	Biro Tapem

	Biro Hukum				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100,00	296,07	
1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	100,00	190,00	
1.2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	100,00	373,33	
1.3	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Pegawai	Pelayanan Administrasi perkantoran	100,00	100,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100,00	2300,00	

	Aparatur				
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	100,00	2300,00	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan	100,00	81,69	
3.1	Pembuatan Laporan Penatausahaan Keuangan dan Asset	Dokumen laporan Penatausahaan yang dihasilkan	100,00	81,69	
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Jumlah penanganan perkara litigasi, non litigasi dan HAM	100	114,28	

	Kebijakan KDH				
4.1	Koordinasi rencana aksi nasional Hak asasi manusia	Jumlah kabupaten yang ikut serta dalam rencana aksi HAM	100	100,00	
4.2	Penanganan Penyelesaian Perkara Litigasi	Jumlah kasus yang disidangkan	100	200,00	
4.3	Penanganan Perkara pada Kasus Non Litigasi	Jumlah kasus yang ditangani	100	100,00	
5	Program Penataan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	138,13	
5.1	Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat	Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	590,00	
5.2	Program Pembentukan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-	100	150,00	

	Peraturan Daerah	undangan			
5.3	Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya	Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya yang tersusun	100	104,42	
5.4	Harmonisasi dan pembahasan peraturan Gubernur	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan	100	124,44	
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah jejaring pemberi layanan dan akses terhadap produk hukum daerah	100	106,47	
6.1	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov. Sulawesi Barat	Akses Publik atas Informasi Produk Hukum	100	106,47	
6.2	Pengundangan dan autentifikasi	Jumlah Pengundangan dan autentifikasi Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat	100	106,47	

	Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat				
3	Biro Ekbang				
3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	15	15	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	50	50	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	43	43	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang terpenuhi	12	12	
	Penyediaan	Jumlah makanan dan Minuman	432	432	

	Makanan dan Minuman	Yang tersedia			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Hasil Laporan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	24	24	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Hasil Laporan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	14	14	
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai	Jumlah tenaga yang menangani pengelolaan administrasi	30	30	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	2	2	
	Pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua dalam	24	24	

	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kondisi layak pakai			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	15	15	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100	-	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pegawai yang terpenuhi	45	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya	100	100	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	8	8	
	Program Peningkatan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	

	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan dan ikhtisar yang tersedia	24	24	
	Penyusunan Renstra/Renja/LA KIP dan LPPD	Jumlah dokumen yang disusun	4	4	
	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah		100	100	
	Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran (TEPRA)		17	17	

	Se- Sulbar				
	Pengembangan Sistem e-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan		17	17	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		5	5	
	Program Penguatan Ekonomi Daerah	Persentase Bahan Kebijakan dan Pembinaan terkait Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Inflasi Daerah	100	100	
	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Prov. Sulbar	Jumlah Dokumen standarisasi harga satuan barang prov.sulbar yang di susun	1	1	
	Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan BUMD	Tingkat Pengawasan dan Pembinaan BUMD	80	80	
	Penyediaan Administrasi Tim	Jumlah dokumen yang terpenuhi	4	4	

	Pengendali Inflasi Prov. Sulbar				
	Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (High Level Meeting)	Jumlah Laporan yang terpenuhi	2	2	
	Penyedia Administrasi TPAKD Prov. Sulbar	Jumlah dokumen yang terpenuhi	1	1	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Prosedur	100	100	
	Koordinasi Dalam Pendampingan dan Perlindungan Hukum Proses Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	4	4	

	Barang/Jasa				
	Penataan Administrasi Layanan Pengadaan	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12	12	
	Penyusunan Katalog Elektronik Lokal	Jumlah dokumen katalog Elektronik Lokal	10	10	
	Workshop Penyusunan dan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Peserta yang terpenuhi	80	80	
4	Biro Kesra	Persentase Outcome dan Output	100	99,26	Biro Kesra
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	99,80	Biro Kesra
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Biaya Honorarium Pegawai Tidak tetap dan	4,000	4,000	Biro Kesra

		materai			
1.2	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	40	40	Biro Kesra
1.3	Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	38,562	38,562	Biro Kesra
1.4	Penyediaan makan dan minum	Jumlah makan dan minum yang disediakan	12	12	Biro Kesra
1.5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan luar daerah yang dilaksanakan	12	12	Biro Kesra
1.6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	15	15	Biro Kesra
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	66,70	Biro Kesra
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opesional	Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat terpelihara	3	2	Biro Kesra
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	100	Biro Kesra
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang terlatih	1	1	Biro Kesra
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan	100	100	Biro Kesra

	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	3	3	Biro Kesra
4.2	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan	2	2	Biro Kesra
4.3	Penyusunan Renstra/Renja/LA KIP dan LPPD	Jumlah dokumen	4	4	Biro Kesra
4.4	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dokumen	2	2	Biro Kesra
4.5	Penyusunan RKAP/DPPA SKPD	Jumlah dokumen	2	2	Biro Kesra
5.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan	-	100	75,90	Biro Kesra
5.1	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Hibah/bansos Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Hibah Bansos Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan	527	400	Biro Kesra
6.	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan	-	100	88,61	Biro Kesra

	Pembinaan Kerukunan Beragama				
6.1	Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi	Jumlah peserta lomba MTQ/STQ tingkat Provinsi	138	100	Biro Kesra
6.2	Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Nasional	Jumlah peserta lomba STQ/MTQ Tingkat Nasional	76	-	Biro Kesra
6.3	Verifikasi Hibah Bansos Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan lainnya	Jumlah laporan verifikasi hibah bansos rumah ibadah dan kegiatan	787	787	Biro Kesra
5	Biro Ortala				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	100	100	Biro Ortala
1.2	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	100	100	Biro Ortala
1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah nilai barang cetakan yang disediakan	100	100	Biro Ortala
1.4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah nilai peralatan rumah tangga yang disediakan	100	100	Biro Ortala
1.5	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dos makanan yang dibeli	100	100	Biro Ortala

1.6	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti	100	100	Biro Ortala
1.7	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti	100	100	Biro Ortala
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	100	100	Biro Ortala
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja; Jumlah honor yang dibayarkan	100	100	Biro Ortala
4	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				
4.1	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan SP4N (Sistem Pengelolaan	Jumlah Peserta	100	100	Biro Ortala

	Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Pemprov. Sulbar				
4.2	Supervisi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah unit layanan yang disupervisi	100	100	Biro Ortala
5	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
5.1	Workshop dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	Jumlah Peserta	100	100	Biro Ortala
5.2	Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Lakip	100	100	Biro Ortala
6	Program Penataan Tata Laksana				
6.1	Evaluasi penerapan SOP Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Perangkat Daerah	100	100	Biro Ortala
6.2	Penyusunan Road Map RB 2020	Jumlah Dokumen Roadmap	100	100	Biro Ortala

	2025 Provinsi Sulawesi Barat				
6.3	Evaluasi Pelaksanaan RB Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Perangkat Daerah	100	100	Biro Ortala
6.4	Evaluasi Peta Proses Bisnis Lingkup Pemprov. Sulbar	Jumlah Dokumen	100	100	Biro Ortala
7	Program Manajemen Sumber Daya Manusia				
7.1	Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Se Sulawesi Barat	Jumlah OPD yang di evaluasi	100	100	Biro Ortala
7.2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan perangkat daerah se Prov Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Standar kompetensi Jabatan	100	100	Biro Ortala
7.3	Penataan Administrasi KGB, KP, dan Pensiun Lingkup Setda Prov. Sulbar	Jumlah Dokumen Administrasi KGB, KP dan Pensiun	100	100	Biro Ortala
8	Program Penguatan Organisasi				
8.1	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten	100	100	Biro Ortala

	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	dan Provinsi Sulawesi Barat			
8.2	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluas	100	100	Biro Ortala
8.3	Sosialisasi perundang undangan tentang organisasi perangkat daerah	Jumah Peserta Sosialisasi	100	100	Biro Ortala
8.4	Pendampingan tentang Tata Cara Penyusunan Budaya Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta	100	100	Biro Ortala
6	Biro Umum				
6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	99,74	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang Dikelola	5300	4865	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Jumlah Rekening yang Terbayarkan Selama Satu Tahun	4	4	

	dan listrik				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak	15	15	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman (kue, nasi dos, dan Prasmanan) yang disediakan	36	36	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dan dilaksanakan di Luar Daerah	220	220	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dan dilaksanakan di Dalam Daerah	100	100	
	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan	25	26	
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai	Jumlah Data/Informasi Kepegawaian	70	70	

	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Sekretariat Daerah	Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Perjalanan Dinas	330	330	
	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Gubernur	Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Perjalanan Dinas	420	420	
	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Wakil Gubernur	Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Perjalanan Dinas	210	210	
	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Perjalanan Dinas	270	270	
	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Para Staf Ahli Gubernur	Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Perjalanan Dinas	270	270	
	Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah Rumah Tangga Pimpinan yang Dikelola dengan Baik	3	3	

	Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat	150	150	
	Penataan Kearsipan Lingkup Biro Umum dan Perlengkapan	Jumlah Tenaga Kearsipan yang Handal	20	20	
6.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang Diadakan	5	5	
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan yang Diadakan	10	10	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diadakan	4	4	
	Pengadaan	Jumlah Pengadaan Peralatan Kerja Di Kantor	10	10	

	peralatan gedung kantor				
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang Terpeliharanya dengan Baik	3	3	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dengan Baik	4	4	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Terpelihara dengan Baik	17	17	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara dengan Baik	164	164	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	35	35	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang Terpelihara	35	35	

	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung VIP Room Bandara	Jumlah Gedung VIP Room Bandara yang Terpelihara	1	1	
	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi	9	9	
	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Direhabilitasi	100	100	
6.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya	100	100	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	19	19	
6.4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	97,50	

	dan Keuangan				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	6	6	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semester Sekretariat Daerah	2	2	
	Penyusunan laporan keuangan triwulanan	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan Sekretariat Daerah	4	4	
	Pengelolaan Gudang dan Pendistribusian Barang	Jumlah Pengelolaan Gedung dan Pendistribusian Barang yang Efektif	25	25	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi	6	6	
	Penyusunan	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang dan Jasa	1	1	

	Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa Lingkup Biro Umum dan Perlengkapan				
	Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara Sekretariat	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Daerah	12	12	
	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	12	12	
	Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara KDH dan WKDH	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban KDH dan WKDH	12	12	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Sekretariat Daerah	12	12	
	Monitoring Penggunaan Barang dan	Jumlah Titik Pelaksanaan Monitoring	28	28	

	Pemanfaatan Barang				
	Penyusunan HPS dan Pengadministrasian Dokumen Proses Pengadaan	Jumlah Dokumen Proses Pengadaan	80	50	
	Penatausahaan PPK SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan PPK SKPD	1	1	
	Konsolidasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Konsolidasi Sekretariat yang Tercapai	12	12	
	Elektronisasi Pencatatan dan Pendataan Barang	Jumlah Pencatatan dan Pendataan Barang Secara Elektronik	25	25	
6.5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil	Persentase layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dan pemerintah provinsi sulawesi barat di dalam dan luar daerah	100	100	

	Kepala Daerah				
	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat	250	250	
	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Jumlah Kegiatan Koordinasi Unsur Muspida	95	95	
	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43	43	
	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	85	85	
	Pelayanan Kedinasan Protokoler	Jumlah Kegiatan Keprotokolan yang Berjalan dengan Baik	150	150	

Pelaksanaan dan tugas fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan umum

Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral dan mengamanatkan dibentuknya organisasi perangkat daerah, serta berdasarkan hasil kajian dan evaluasi, terdapat beberapa satuan kerja perangkat daerah termasuk Sekretariat Daerah yang dianggap mendesak untuk dilakukan penataan kembali susunan organisasinya berdasarkan tingkat kebutuhan, karakteristik, kemampuan anggaran dan SDM aparatur, beban kerja. Secara garis besar dapat dipetakan permasalahan kelembagaan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

a. Overload

Overload yang terjadi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya aparatur, yang ada pada setiap Biro.

b. Overlapping Internal

Permasalahan overlapping internal terjadi karena kurangnya komunikasi kerja baik secara vertikal maupun horizontal, dan kekurangmampuan pejabat tertentu dalam menyelesaikan permasalahan/tugas, yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga pimpinan memberikan tugas tersebut kepada pejabat lain yang dianggap mampu meskipun bukan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini akan menimbulkan permasalahan, tatkala tugas yang diberikan oleh pimpinan tersebut bersentuhan dengan penganggaran dan tanggung jawab sebagai pemegang jabatan tersebut.

c. Overlapping Eksternal

Overlapping eksternal disebabkan oleh tidak spesifiknya tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, LTD, dan biro. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan kebijakan teknis menjadi tidak jelas.

d. Anggaran

Kurang seimbang antara beban tugas dan alokasi anggaran, serta dukungan sarana dan prasarana penunjang menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menyebabkan menurunnya kinerja.

2. Analisa Permasalahan dan Formulasi kebijakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Untuk Optimalisasi fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Sekretaris Daerah, oleh karena itu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Asisten Bidang Pemerintahan

Membawahi

- a. Biro Tata Pemerintahan
- b. Biro Hukum

2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Membawahi

- a. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat

3. Asisten Bidang Administrasi Umum

Membawahi

- a. Biro Organisasi dan Tatalaksana
- b. Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol

a. Biro Tata Pemerintahan

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 dikategorikan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang rata-rata mencapai target yang telah ditentukan. Namun Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. adapun permasalahannya ialah :

- ❖ faktor internal : Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, disebabkan kurangnya Koordinasi dan Perencanaan yang masih perlu diperbaiki sehingga waktu sangat sempit untuk merealisasikan kegiatan seratus persen;
- ❖ Faktor Eksternal : hadirnya virus covid-19 di Indonesia yang mengharuskan refocusing anggaran dan pembatasan dalam melaksanakan aktifitas yang dapat melanggar protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19.

b. Biro Hukum

Pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Biro Hukum. Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian

besar kegiatan Biro Hukum telah mencerminkan kinerja yang berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah dengan Biro Hukum dalam mempersiapkan kajian akademik/naskah akademik dari Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan, penyesuaian jadwal pembahasan dengan Legislatif;
- Kurang sinkronnya proses perencanaan dengan proses pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 pada Biro Perekonomian dan Administrasi Perekonomian telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Biro Hukum. Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian besar telah berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah dengan Biro Perekonomian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti: Penyusunan Dokumen Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran Pembangunan Daerah;

- Kondisi Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi capaian kinerja Biro Perekonomian dalam mengendalikan nilai inflasi daerah Provinsi Sulawesi Barat maupun peningkatan kualitas BUMD dan BLUD yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sehingga target pengendalian kebijakan perekonomian kurang optimal, dimana kondisi tersebut dirasakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
- Kualitas kecepatan jaringan internet di wilayah Sulawesi Barat merupakan masalah yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik (*e-procurement*)
- Kurang sinkronnya proses perencanaan dengan proses pelaksanaan program dan kegiatan.

d. Biro Kesejahteraan Rakyat

Secara umum pelaksanaan program kegiatan yang ada di biro kesejahteraan rakyat sudah sesuai dengan target yang ditentukan didalam RPJMD dan RENSTRA namun tetap kami menyadari masih ada beberapa hal ingin diperbaiki mulai dari perencanaan sampai pada tahapan teknis pelaksanaan kegiatan tersebut agar lebih tepat sasaran. Adapun masalah yang ada ialah perbaikan SOP pada setiap kegiatan terutama pada bantuan rumah ibadah.

e. Biro Organisasi dan Tatalaksana

Sebagian OPD menganggap Biro Organisasi dan Tatalaksana kurang berperan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, sehingga Biro Organisasi menjadi salah satu instansi pemerintah daerah yang termarginalkan yang berimbas pada penganggaran. Namun sesungguhnya fungsi dan peran Biro Organisasi dan Tatalaksana sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi dimana Biro Organisasi dan Tatalaksana

melakukan kajian analisis jabatan, penataan kelembagaan, dan penataan ketatalaksanaan terhadap susunan organisasi dan tata kerja OPD. Baik atau buruk hasil kajian tersebut akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Organisasi selain memberikan pelayanan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, juga memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu pelaksanaan fasilitasi dan klarifikasi raperda organisasi perangkat daerah

f. Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum yang berorientasi pada pelayanan administrasi umum, administrasi pimpinan dan pelayanan rumah tangga, dalam pelaksanaan tanggungjawab tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2020 yaitu :

➤ Masalah Internal

- Masih belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana penunjang operasional kantor sehingga menyebabkan pelayanan fasilitasi acara dan kerumahtanggaan tidak maksimal
- Belum diterapkannya sistem administrasi terintegrasi sehingga menyebabkan pelayanan administrasi umum dan administrasi pimpinan kurang efektif

➤ Masalah Eksternal

- Adanya penyebaran wabah covid-19 mengakibatkan munculnya kebijakan baru dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan membuat pelaksanaan fisik kegiatan terbatas serta dari segi keuangan dalam menanggulangi dampak penyebaran covid-19 Biro Umum mengalami Refocusing anggaran sebesar 50%.

- Kurangnya kesadaran instansi lain dalam menjalankan administrasi persuratan sesuai SOP terutama dalam hal surat menyurat.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

a. Tantangan

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Percepatan reformasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat nomor 32 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan;
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
4. Lemahnya tingkat kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Lemahnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
6. Berbagai kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah;
7. Kurangnya koordinasi dan integrasi dari organisasi perangkat daerah lain terkait kebijakan strategis;
8. Keterbatasan sumberdaya aparatur yang kompeten dibidangnya meskipun dilihat dari strata pendidikan sebagian besar berpendidikan di atas SLTA.

b. Peluang

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Seiring dengan lahirnya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka diperlukan upaya penataan kelembagaan

- perangkat daerah. Sesuai kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan baik anggaran maupun sumber daya aparatur;
2. Situasi dan kondisi, keamanan dan ketertiban baik skala nasional maupun lokal;
 3. Peraturan perundang-undangan tentang reformasi birokrasi dan percepatan pemberantasan KKN, serta adanya komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN;
 4. Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance, penetapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan upaya pencegahan KKN;
 5. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya aparatur Sekretariat Daerah.

2.4. Formulasi Isu-isu Penting

Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaah dari komponen komponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari analisis SWOT serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 5 (lima) isu strategis permasalahan adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perizinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban)

2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

3. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakikatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

4. Restrukturisasi organisasi dan manajemen publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-engineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi“. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum

sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

5. Manajemen keuangan dan aset daerah

Kuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Visi dan Misi

RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Sulawesi Barat.

Visi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022

“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi Pertama

Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya. yaitu Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Misi Kedua

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya. yaitu kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan

luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Misi Ketiga

Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis. yaitu Penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Misi Keempat

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi. yaitu Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan "teknologi" produksi itu sendiri. Harrod – Domar mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap atau steady growth dalam jangka panjang pada semua variabel seperti output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi dari para pelaku ekonomi, inovasi ini berarti adanya perbaikan dalam arti luas. Misalnya adanya penemuan produk baru ataupun penemuan pasar baru.

Misi Kelima

Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan. yaitu kesatuan dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran
I	Biro Tata Pemerintahan	
1.	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	Terbitnya Permendagri batas wilayah antar Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan antar Provinsi Sulawesi Barat
		Terfasilitasinya Urusan Administrasi Pemerintahan
		Terbangunnya Pilar Batas antar Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Barat dan Pilar Batas antar Provinsi Sulawesi Barat
		Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi urusan Kerjasama Daerah
		Terfasilitasinya koordinasi dan Konsultasi Standar Pelayanan Minimal
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Terbinanya pemerintah kabupaten dalam menyusun penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Terfasilitasinya administrasi

		kepala daerah dan wakil kepala daerah
		Terfasilitasinya administrasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Adanya fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Urusan Keagamaan
		Adanya fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
		Adanya fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
II	Biro Hukum	
1.	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Meningkatnya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
		Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Hukum
2	Meningkatkan pelayanan penanganan perkara	Terlaksananya pelayanan penanganan perkara
3	Meningkatkan pelayanan dan informasi terhadap permasalahan HAM	Terlaksananya pelayanan dan informasi terhadap permasalahan HAM
4	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak lanjut hasil audit	Terlaksananya pelayanan tindak lanjut hasil audit

5	Meningkatkan pelayanan informasi terhadap permasalahan HAM	Terlaksananya pelayanan informasi terhadap permasalahan HAM
6	Meningkatkan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7	Meningkatkan jumlah jejaring pemberi layanan dan akses terhadap produk hukum daerah	Meningkatnya jumlah jejaring pemberi layanan dan akses terhadap produk hukum daerah
8	Meningkatkan presentase penyampaian dokumen laporan penatausahaan yang dihasilkan	Meningkatnya persentase penyampaian dokumen laporan penatausahaan yang dihasilkan
III	Biro Ekbang	
1	Meningkatkan Penyerapan Anggaran dan Analisis Sarana dan Prasarana Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Penyerapan Anggaran dan Analisis Sarana dan Prasarana Pembangunan
2	Meningkatkan Perekonomian dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Pengendalian Inflasi Daerah
IV	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
1	Meningkatkan penggunaan layanan pengadaan barang /jasa sesuai prosedur pada perangkat daerah	Meningkatnya penggunaan layanan pengadaan barang /jasa sesuai prosedur pada perangkat daerah
2	Meningkatkan penggunaan layanan pengadaan barang /jasa secara elektronik pada pelaku pengadaan	Meningkatnya penggunaan layanan pengadaan barang /jasa secara elektronik pada pelaku pengadaan
3	Meningkatkan pemahaman pelaku dan pengelola pengadaan barang / jasa	Meningkatnya pemahaman pelaku dan pengelola pengadaan

		barang / jasa
V	Biro Organisasi	
1	Meningkatkan kualitas kelembagaan Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan fungsi dan tepat ukuran	Meningkatnya kualitas kelembagaan provinsi dan kabupaten sesuai dengan fungsi dan tepat ukuran
2	Meningkatkan Persentase Aparatur yang Menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensinya	Meningkatnya Persentase Aparatur yang Menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensinya
3	Meningkatkan Nilai Predikat SAKIP	Meningkatnya Nilai Predikat SAKIP
4	Meningkatkan penyusunan SOP Sesuai Tupoksi	Meningkatnya penyusunan SOP Sesuai Tupoksi
5	Meningkatkan Indeks RB	Meningkatnya Indeks RB
6	Meningkatkan kualitas unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Provinsi dan Kabupaten	Meningkatnya kualitas unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Provinsi dan Kabupaten
VI	Biro Umum	
1	Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2	Meningkatkan Percepatan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tingkat Percepatan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
4	Meningkatkan Layanan Penyediaan Informasi	Meningkatnya Layanan Penyediaan Informasi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lampiran I tentang matrik pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Sub. Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan perundang undangan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3,201,440,000
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	324,200,000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.400.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.320.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.230.000

1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.500.000
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.500.000
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.900.000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.350.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,550,000
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.900.000
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	78.650.000
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	507,070,000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	239.680.000
3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.800.000
3.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.790.000
3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.800.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,289,450,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	93.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	150.650.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	796.800.000

5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	611,320,000
5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	476.000.000
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.970.000
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.350.000
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381,850,000
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.400.000
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.650.000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.800.000
II	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	15,713,425,000
1.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	9,081,465,000
1.1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1.475.870.000
1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2.400.225.000
1.3	Fasilitasi Penataan Wilayah	5.205.370.000
2.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	3,951,780,000
2.1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1.799.450.000

2.2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	300.430.000
2.3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.851.900.000
3.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	2,680,180,000
3.1	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1.680.910.000
3.2	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	545.630.000
3.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	453.640.000
III	Program Kesejahteraan Rakyat	81,163,905,000
1.	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	77,845,025,000
1.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	57.824.250.000
1.2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	20.020.775.000
2.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1,778,190,000
2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	564.000.000
2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	437.650.000
2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	776.540.000
3.	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1,540,690,000
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	453.780.000
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan	543.260.000

	Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	543.650.000

B. Biro Hukum

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3,897,100,000
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	210.000.000
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.000.000
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
3.2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
3.3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
4.	Administrasi Kepegawaian	690.000.000

	Perangkat Daerah	
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000
4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	115.000.000
4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000
4.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000
4.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000
4.6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	190.000.000
4.7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000
4.8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	750.000.000
5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000
5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000
5.5	Penyediaan Bahan/Material	150.000.000
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000

5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.210.000.000
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000
6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000
6.3	Pengadaan Mebel	200.000.000
6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.000.000
6.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000
6.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.000.000
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	111.000.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.100.000
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.000.000
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000

8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.100.000
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.000.000
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.595.000.000
1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.410.000.000
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	950.000.000
1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	460.000.000
1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	350.000.000
1.4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	650.000.000
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.185.000.000
2.1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	885.000.000
2.2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	300.000.000

C. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.940.000.000
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000.000
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.000.000
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100.000.000
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250.000.000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000.000
2.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000
2.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	650.000.000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250.000.000
3.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	100.000.000

	Kinerja Pegawai	
3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.540.000.000
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130.000.000
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.000.000
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	180.000.000
4.5	Penyediaan Bahan/Material	260.000.000
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000
4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.000.000
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000

6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.500.000.000
7.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	2.200.000.000
7.1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1.100.000.000
7.2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1.100.000.000
8.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	800.000.000
8.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	200.000.000
8.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	200.000.000
8.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	400.000.000
9.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.500.000.000
9.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	300.000.000
9.2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	300.000.000
9.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	300.000.000
9.4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan	300.000.000

	Layanan Umum Daerah	
9.5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	300.000.000
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.150.000.000
10.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	550.000.000
10.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	150.000.000
10.2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	200.000.000
10.3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	200.000.000
11.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	600.000.000
11.1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	200.000.000
11.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	200.000.000
11.3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	200.000.000
	JUMLAH	9.590.000.000

D. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.535.000.000
1	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat Kinerja Daerah	200.000.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	200.000.000
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	875.000.000
3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000
3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
3.3	Penyediaan Bahan/Material	125.000.000
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160.000.000

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
II	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3.260.000.000
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	860.000.000
1.1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000
1.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	360.000.000
1.3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	750.000.000
2.1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	250.000.000
2.2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000
2.3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000.000
3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	450.000.000
3.2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	400.000.000
3.3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	800.000.000

	J U M L A H	4.795.000.000
--	--------------------	----------------------

E. Biro Organisasi

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.080.000.000
1	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat Kinerja Daerah	150.000.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000
2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.070.000.000
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
3.5	Penyediaan Bahan/Material	70.000.000
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	650.000.000

	Konsultasi SKPD	
3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.000.000
4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000
4.2	Pengadaan Mebel	100.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000
II	Program Penataan Organisasi	3.200.000.000
1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.200.000.000
1.1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	600.000.000
1.2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	300.000.000
1.3	Penataan Analisis Jabatan	300.000.000
2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	2.000.000.000
2.1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	700.000.000
2.2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	250.000.000
2.3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	100.000.000
2.4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	700.000.000
2.5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	250.000.000
	J U M L A H	5.280.000.000

F. Biro Umum

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.535.287.560.099
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	725.150.388
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	324.336.624
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	57.481.656
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	57.489.216
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	42.443.136
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	42.443.136
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	128.223.480
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.733.140
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.248.143.630,80
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.433.811.778,80
2.2	Penyediaan Administrasi	252.352.716

	Pelaksanaan Tugas ASN	
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.023.776.364
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	214.676.400
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.346.748
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	123.332.736
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	83.575.872
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	70.271.016
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.713.496.278
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	620.686.782
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.681.529.648
3.3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	639.671.616
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	115.335.072

	Barang Milik Daerah pada SKPD	
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	93.363.240
3.6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	562.909.920
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.286.753.472
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200.000.000
4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	613.505.952
4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	243.786.720
4.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	111.066.240
4.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.056.960
4.6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000
4.7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	875.337.600
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.889.178.708
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.391.594.304
5.2	Penyediaan Peralatan dan	235.327.152

	Perlengkapan Kantor	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	547.165.776
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.466.629.124
5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	578.535.960
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	350.000.000
5.7	Penyediaan Bahan/Material	500.000.000
5.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.183.375.032
5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.553.431.632
5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	83.119.728
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.235.363.244
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000.000
6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.288.816.000
6.3	Pengadaan Alat Besar	900.000.000
6.4	Pengadaan Mebel	600.000.000
6.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000
6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3.047.486.076

	atau Bangunan Lainnya	
6.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.899.061.168
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.514.904.348
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	583.625.460
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.783.442.888
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.647.836.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.085.851.136
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.399.272.296
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.791.084.656
8.3	Pemeliharaan Mebel	400.000.000
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.261.958.184

8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.233.536.000
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.963.446.608
9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	285.781.432
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000
9.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	77.665.176
9.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.200.000.000
10	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	21.349.521.924
10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7.212.700.992
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	5.352.441.840
10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	8.784.379.092

11	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	13.904.316.501
11.1	Penyiapan Materi Pimpinan	2.799.573.974
11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10.255.565.167
11.3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	849.177.360
12	Fasilitasi Keprotokolan	2.993.466.972
12.1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	438.153.444
12.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.032.055.032
12.3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.523.258.496
	JUMLAH	129.909.593.210

BAB V

PENUTUP

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat diupayakan secara optimal untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022.
2. Selanjutnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera menyusun RKA dan DPA tahun 2022 dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja tersebut baik triwulan maupun semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kab/Kota maupun Pemerintah Pusat.

4.2 Penutup

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 ini, memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran dan evaluasi kerja tahun sebelumnya. Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada perumusannya saja akan tetapi pada saat diimplementasikan oleh seluruh elemen Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.Si

Pangkat : Pembina Utama
Nip. 19640015 199303 1 001

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0001 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Biro Pemerintahan & Kesra	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	5 Dokumen	8,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	100 Persen	90,788,000	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Biro Pemerintahan & Kesra	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	5 Dokumen	78,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	100 Persen	90,870,000	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							605,770,000				880,380,000		
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan umlah Pakaian Khusus yang Diadakan	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	84 Pasang	84 Pasang	100 Persen	239,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	570,790,000
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Persentase kelengkapan data kepegawaian	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	10,900,000	
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	7,890,000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Tingkat keikutsertaan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	50 Persen	100 Persen	98,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	0	
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	250,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	290,800,000	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,289,450,000				2,554,650,000		
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Jenis	210 Dokumen	249,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	1,548,000,000	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Barang yang dicetak Jumlah Barang yang digandakan	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Jenis	1 Jenis	210 Dokumen	93,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	55,400,000
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	40 Jenis	210 Dokumen	150,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	50,800,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0001 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen percepatan penerapan SPM Jumlah rapat dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran berjalan Jumlah rapat koordinasi APPSI/BKPRS Jumlah rapat koordinasi dengan instansi vertikal Jumlah rapat koordinasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	Adanya dokumen terkait tugas pemerintahan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen 6 Rapat 2 Rapat 6 Rapat 3 Rapat	3 Dokumen	2,400,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	100 Persen	2,500,000,000
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	Jumlah berita acara kesepakatan rapat penataan batas wilayah Jumlah berita acara kesepakatan rapat penegasan batas wilayah Jumlah dokumen kode wilayah kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terinventarisir Jumlah orang yang mengikuti pelatihan terkait batas wilayah Jumlah Pilar yang dipasang, dipelihara atau dirapatkan Jumlah rapat koordinasi bidang administrasi kewilayahan	Adanya dokumen terkait tugas pemerintahan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Berita Acara 3 Berita Acara 1 Dokumen 55 Orang 25 Pilar 6 Rapat	3 Dokumen	5,205,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	100 Persen	6,005,460,000
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah								3,951,780,000					4,996,700,000
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	Jumlah Anggota DPRD yang di PAW Jumlah dokumen memory jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tersusun Jumlah dokumen pelayanan kedinasan kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan administrasi pemerintahan	Adanya Dokumen Urusan Otonomi Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Orang 2 Dokumen 3 Dokumen 65 Orang	3 Dokumen	1,799,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	100 Persen	2,453,000,000
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen penataan dan pembentukan daerah otonomi baru yang tersusun	Adanya Dokumen Urusan Otonomi Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	300,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	100 Persen	543,900,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0001 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen pengukuran penyelenggaraan pemerintah daerah Jumlah kabupaten yang dibina Jumlah orang yang mengikuti Bimtek LPPD Jumlah Rapat antar Pemerintah Daerah terkait LPPD Jumlah rapat koordinasi gubernur sebagai Kepala Daerah	Adanya Dokumen Urusan Otonomi Daerah	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Rapat 6 Kabupaten 120 Orang 1 Rapat 6 Rapat	3 Dokumen	1,851,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	100 Persen	1,999,800,000
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah							2,680,180,000					2,977,779,000	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen kerjasama daerah yang terinventarisir Jumlah dokumen pengembangan kerjasama daerah Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah yang tertandatangani	Adanya Dokumen terkait Kerjasama Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen 3 Dokumen 6 MoU	100 Persen	1,680,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	100 Persen	1,753,000,000
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	Jumlah MoU kerjasama dengan badan usaha/swasta yang tertandatangani	Adanya Dokumen terkait Kerjasama Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 MoU	100 Persen	545,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	100 Persen	723,900,000
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan kerjasama	Adanya Dokumen terkait Kerjasama Daerah	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Rapat	100 Persen	453,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	100 Persen	500,879,000
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								81,163,905,000				89,989,220,000	
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual								77,845,025,000				85,210,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0001 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelayanan Kehidupan Beragama Jumlah Dokumen Pembinaan Mental Spritual Jumlah Pembinaan Mental Pengurus Rumah Ibadah se Sulawesi Barat Jumlah Permohonan Rumah Ibadah dan Lembaga Kegiatan Keagamaan lainnya yang di Verifikasi Jumlah Peserta Hari-hari Besar Keagamaan Jumlah Peserta Silaturahmi Ulama Jumlah Peserta Tablik Akbar dan Zikir Bersama Jumlah Peserta Training Center Tahfidz Al-Quran Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keagamaan Jumlah Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan Lainnya yang mendapatkan Bantuan Jumlah Rumah Ibadah dan Lembaga Kegiatan Keagamaan lainnya yang di Monitoring dan di Evaluasi	Persentase Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen 6 Dokumen 70 Orang 400 Perumahan 80 Peserta 60 Peserta 200 Peserta 77 Peserta 7 Rapat 285 Unit 285 Unit	100 Persen	57,824,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	60,860,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0001 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Peserta Dialog antar Umat Beragama Jumlah Peserta Festival Paduan Suara Gerejawi Tk. Nasional (FESPARAWI) Jumlah Peserta Festival Paduan Suara Gerejawi Tk. Nasional (PESPARANI) Jumlah Peserta Festival Seni Qasidah Tk. Nasional (LASQI) Jumlah Peserta Festival Seni Qasidah Tk. Provinsi (LASQI) Jumlah Peserta Kemah Bersama ORMAS Jumlah Peserta Pekan Olahraga Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS) Jumlah Peserta Pelatihan pembinaan karakter bagi warga binaan Rutan (ESQ) tingkat Sulawesi Barat Jumlah Peserta Peltihan Remaja Masjid Tk. Sulawesi Barat Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Quran/Musabaqah Tilawatil Quran Tk. Nasional Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Quran /Musabaqah Tilawtil Quran Tk. Provinsi Jumlah Peserta Seni Budaya Islam/Seni Religi Tingkat Sulawesi Barat Jumlah TIM Pemandu Haji Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Persentase Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	120 Peserta 60 Peserta 55 Peserta 30 Peserta 30 Peserta 70 Peserta 75 Peserta 50 Peserta 80 Peserta 60 Peserta 60 Peserta 30 Peserta 1 Tim	100 Persen	20,020,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	24,350,000,000
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				1,778,190,000					3,124,070,000			
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Adanya Dokumen Kesejahteraan Rakyat terkait Pelayanan Dasar	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan 6 Rapat	3 Dokumen	564,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	2,030,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0001 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Adanya Dokumen Kesejahteraan Rakyat terkait Pelayanan Dasar	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan 6 Rapat	3 Dokumen	437,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	546,790,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0001 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Adanya Dokumen Kesejahteraan Rakyat terkait Pelayanan Dasar	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan 6 Rapat	3 Dokumen	776,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	546,780,000
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar								1,540,690,000					1,655,150,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0001 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Adanya Dokumen Kesejahteraan Rakyat terkait Non Pelayanan Dasar	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Rapat 5 Rapat	100 Persen	453,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	532,900,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0001 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Adanya Dokumen Kesejahteraan Rakyat terkait Non Pelayanan Dasar	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Rapat 6 Rapat	100 Persen	543,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	566,800,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0001 Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesra

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Perhubungan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Adanya Dokumen Kesejahteraan Rakyat terkait Non Pelayanan Dasar	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Rapat 3 Rapat	100 Persen	543,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	555,450,000
TOTAL									100,177,470,000					113,343,915,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0002 Sekretariat Daerah Biro Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	Terkelolanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	111,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	121,000,000
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								576,100,000					756,100,000
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	11 Unit	100 Persen	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	190,000,000
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	13 Unit	100 Persen	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	90,000,000
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	20 Unit	100 Persen	26,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	36,100,000
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	1 Unit	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	150,000,000
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	10 Unit	100 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	30,000,000
4 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	3 Unit	100 Persen	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	260,000,000
4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								3,595,000,000					3,895,000,000
4 01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan								2,410,000,000					2,610,000,000
4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yang dikelola	Terkelolanya Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	35 Dokumen	1785 Dokumen	950,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100 Persen	1,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0002 Sekretariat Daerah Biro Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang dikelola	Terkelolanya Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	500 Dokumen	1785 Dokumen	460,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100 Persen	510,000,000
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Jumlah Naskah Hukum Lainnya yang dikelola Jumlah Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya yang diautentifikasi Jumlah Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya yang didokumentasikan	Terkelolanya Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	35 Dokumen 570 Dokumen 570 Dokumen	1785 Dokumen	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100 Persen	400,000,000
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III yang dikelola Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II yang dikelola Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I yang dikelola	Terkelolanya Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 Dokumen 25 Dokumen 25 Dokumen	1785 Dokumen	650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100 Persen	700,000,000
4 01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum								1,185,000,000					1,285,000,000
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Jumlah Penanganan Sengketa Litigasi yang dikelola	Terkelolanya Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	2 Kasus	8 Kasus	885,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100 Persen	935,000,000
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Jumlah Koordinasi Rencana Aksi HAM di Daerah Jumlah Penanganan Sengketa Non Litigasi yang dikelola	Terkelolanya Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	4 Laporan 2 Kasus	8 Kasus	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100 Persen	350,000,000
TOTAL									7,492,100,000					9,072,100,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0003 Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01	SEKRETARIAT DAERAH										9,590,000,000		11,720,000,000			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										3,940,000,000		4,570,000,000		
4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										900,000,000		1,060,000,000	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	3 Dokumen	60 Poin	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP OPD	82 Poin	180,000,000
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	2 Dokumen	60 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	1 Dokumen	60 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	1 Dokumen	60 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	1 Dokumen	60 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	30 Laporan	60 Poin	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP OPD	82 Poin	280,000,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	4 Dokumen	60 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										200,000,000		240,000,000	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	17 Laporan	100 Porsen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0003 Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	24 Laporan	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								650,000,000					740,000,000
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya yang diadakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	81 Pasang	100 Persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	300,000,000
4.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	32 Laporan	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP OPD	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	20 Orang	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	320,000,000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,540,000,000					1,740,000,000
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	60 Jenis	100 Persen	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	50 Jenis	100 Persen	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	150,000,000
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	50 Jenis	100 Persen	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	150,000,000
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	5000 Jenis	100 Persen	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0003 Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	250 Jenis	100 Persen	260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	300,000,000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Poin	200 Laporan	100 Persen	650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	700,000,000
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	17 Laporan	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								250,000,000					300,000,000
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	10 Unit	100 Persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	300,000,000
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								400,000,000					490,000,000
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	13 Unit	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	250,000,000
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	2 Unit	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	10 Unit	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								4,500,000,000					5,700,000,000
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian								2,200,000,000					3,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0003 Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Kajian Analisis Kebijakan Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Kajian Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi Jumlah dokumen Pendukung Pengendalian Inflasi berada pada rentang kendali Nasional Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja SDM TPID terhadap Pengendalian Inflasi	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	100 Persen	1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,500,000,000
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Optimalisasi Penyaluran KUR melalui SIKP dan pola kemitraan Jumlah Dokumen pendukung Pencapaian Target Liberasi dan Inklusi Keuangan Jumlah Dokumen Peningkatan Akses Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Peningkatan Kerja TPAKD	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	100 Persen	1,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,500,000,000
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						800,000,000				950,000,000
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan di Pemprov. Sulbar.	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Pemprov. Sulbar.	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dan Pemantauan HET LPG Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450,000,000
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						1,500,000,000				1,750,000,000
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0003 Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaaam Badan Usaha Milik Daerah Air MInum, Limbah dan Sanitasi	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Laporan	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Jumlah Dokumen Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Laporan	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								1,150,000,000				1,450,000,000	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah								550,000,000				700,000,000	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan MONEV Pembangunan Daerah Jumlah Laporan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBD Prov. Sulbar	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		100 Persen	17 Laporan 17 Laporan	100 Persen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100 Persen	200,000,000
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBN	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		100 Persen	17 Laporan	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100 Persen	250,000,000
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD di Kabupaten	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	17 Laporan	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100 Persen	250,000,000
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah								600,000,000				750,000,000	
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Hasil analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Prov Sulbar	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100 Persen	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0003 Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan TEPPRA yang terpenuhi	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	17 Laporan 17 Laporan	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100 Persen	250,000,000
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100 Persen	250,000,000
TOTAL									9,590,000,000					11,720,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0004 Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH										4,795,000,000		5,305,000,000				
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										1,535,000,000		1,755,000,000			
4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										200,000,000		235,000,000		
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	4 dokumen	60 Poin	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	125,000,000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	4 laporan	60 Poin	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	55,000,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	4 dokumen	60 Poin	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	55,000,000
4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										200,000,000		250,000,000		
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Persentase Laporan Keuangan	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	1 laporan	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	125,000,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun	Persentase Laporan Keuangan	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	4 laporan	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	125,000,000
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										875,000,000		975,000,000		
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	30 jenis	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	225,000,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	10 jenis	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	125,000,000
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	40 jenis	100 Persen	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	150,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0004 Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Tingkat Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	100 persen	100 Persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	275,000,000
4 01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							1,650,000,000					1,800,000,000	
4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Personil Program Pengembangan SDM	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	30 orang	100 Persen	450,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	500,000,000
4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	80 Orang	100 Persen	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	450,000,000
4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta advokasi, pendampingan dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	200 orang	100 Persen	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	850,000,000
TOTAL									4,795,000,000				5,305,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0005 Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH										5,280,000,000		5,330,000,000				
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										2,080,000,000		2,080,000,000			
4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										150,000,000		150,000,000		
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	4 Dokumen	24 Poin	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	50,000,000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	2 Laporan	24 Poin	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	50,000,000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	3 Dokumen	24 Poin	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	50,000,000
4	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										250,000,000		250,000,000		
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	100 Pasang	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	200,000,000
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	10 Orang	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	50,000,000
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,070,000,000		1,070,000,000		
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	10 Jenis	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	100,000,000
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	10 Jenis	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	50,000,000
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	300 Jenis	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	100,000,000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	30 Jenis 50 Jenis	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	50,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0005 Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	60 Jenis	100 Persen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	70,000,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	40 Dokumen 30 Dokumen	100 Persen	650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	650,000,000	
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	10 Dokumen	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	50,000,000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							500,000,000					500,000,000		
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	1 Unit	100 Persen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	400,000,000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	15 Unit	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	100,000,000	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							110,000,000						110,000,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	50,000,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	100 Persen	5 Unit	100 Persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	100 Persen	60,000,000	
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							3,200,000,000						3,250,000,000	
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan							1,200,000,000							1,200,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0005 Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Evaluasi Jumlah Laporan Monev Kelembagaan Provinsi Jumlah Peserta bimbingan teknis Jumlah peserta yang terlatih	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	41 Dokumen 41 Laporan 41 Peserta 41 Peserta	100 Persen	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	100 Persen	600,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0005 Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasiitas Kelembagaan Kabupaten Jumlah Laporan Monev Kelembagaan Kabupaten	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Laporan Sub Kegiatan 1 Laporan	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	100 Persen	300,000,000
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK dan Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Dokumen Sub Kegiatan 10 Dokumen	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	100 Persen	300,000,000
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja								2,000,000,000					2,050,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0005 Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah dokumen pendukung RB Jumlah Kabupaten yang dimonitoring dan dievaluasi Jumlah Laporan Monev Jumlah OPD yang menginput PMP RB tepat waktu Jumlah Perangkat Daerah Yang Dibina Jumlah Perangkat Daerah Yang dievaluasi Persentase Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Dokumen 6 Kabupaten 1 Laporan 40 OPD 5 OPD 5 OPD 100 Persen	100 Persen	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	100 Persen	700,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0005 Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah OPD dan Kabupaten yang telah menyusun dan melengkapi dokumen SAKIP tepat waktu dan berkualitas baik Jumlah OPD dan Pemerintah Kabupaten yang menyusun LKJIP tepat waktu dengan kualitas baik Jumlah OPD yang telah menyusun Indikator Kinerja berbasis outcome Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan implementasi SAKIP di lingkup Pemprov dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	46 OPD 46 OPD 40 OPD 30 6	100 Persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	100 Persen	250,000,000
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan budaya kerja sesuai pedoman	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	40 OPD	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	100 Persen	100,000,000
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah Dok. SOP Jumlah OPD yang telah menyusun Peta Proses Bisnis Jumlah Peraturan Gubernur	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	41 Dokumen 20 OPD 1 Pergub	100 Persen	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	100 Persen	700,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0005 Sekretariat Daerah Biro Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah Kabupaten yang dimonitoring untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Jumlah OPD Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah menyusun dan menjabarkan 7 (tujuh) aspek kebijakan Pelayanan Publik Jumlah OPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat provinsi dan Nasional Tertindakannya monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkup Pemprov dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Kabupaten 40 OPD 10 OPD 36 OPD	100 Persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	100 Persen	300,000,000
TOTAL									5,280,000,000				5,330,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0006 Sekretariat Daerah Biro Umum

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP OPD	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	Tercapainya Penyerapan Anggaran SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	100 persen	100 Persen	252,352,716	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	300,000,000
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Register Pengesahan SPJ	Tercapainya Penyerapan Anggaran SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	2400 dokumen	100 Persen	1,023,776,364	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	1,200,000,000
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD	Tercapainya Penyerapan Anggaran SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	12 laporan	100 Persen	214,676,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	220,000,000
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Tercapainya Penyerapan Anggaran SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	1 laporan	100 Persen	46,346,748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	47,000,000
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai SAKIP OPD	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan	Tercapainya Penyerapan Anggaran SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	100 persen	100 Persen	123,332,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	200,000,000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun	Tercapainya Penyerapan Anggaran SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	16 laporan	100 Persen	83,575,872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	85,000,000
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tercapainya Penyerapan Anggaran SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	2 laporan	100 Persen	70,271,016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	72,000,000
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4,713,496,278					4,920,000,000	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen HPS Rencana Kebutuhan Barang Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Barang yang Efektif	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	30 dokumen 30 dokumen	100 Persen	620,686,782	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	650,000,000
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jenis Pengamanan Barang Milik Daerah yang Tersedia	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Barang yang Efektif	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	4 jenis	100 Persen	2,681,529,648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	2,800,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0006 Sekretariat Daerah Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Barang yang Efektif	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	3 laporan	100 Persen	639,671,616	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	640,000,000
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Barang yang Efektif	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	12 laporan	100 Persen	115,335,072	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	140,000,000
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Barang yang Efektif	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	12 laporan	100 Persen	93,363,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	100,000,000
4.01.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Laporan Hasil Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Barang yang Efektif	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	1 laporan 1 laporan	100 Persen	562,909,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	590,000,000
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2,286,753,472					2,565,000,000
4.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai SAKIP OPD	jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Efektif	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	0 unit	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	250,000,000
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Efektif	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	673 pasang	100 Persen	613,505,952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	700,000,000
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Efektif	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	1 laporan	100 Persen	243,786,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	300,000,000
4.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen SOP Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Efektif	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	27 dokumen 1 laporan	100 Persen	111,066,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	120,000,000
4.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Efektif	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	75 laporan	100 Persen	43,056,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	45,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.4.01.4.01.27.0006 Sekretariat Daerah Biro Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP OPD	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	100 persen	100 Persen	1,183,375,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	1,200,000,000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	750 laporan	100 Persen	1,553,431,632	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	2,000,000,000
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum SKPD	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	1 laporan	100 Persen	83,119,728	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	85,000,000
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								14,235,363,244					14,950,000,000
4.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP OPD	jumlah mobil jabatan yang diadakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	4 unit	100 Persen	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	1,500,000,000
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	6 Unit	100 Persen	3,288,816,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	3,400,000,000
4.01.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Alat Besar yang Diadakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	2 Unit	100 Persen	900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	1,000,000,000
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Nilai SAKIP OPD		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		82 Poin		100 Persen	600,000,000			Nilai SAKIP OPD	82 Poin	650,000,000
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	jumlah perelatan dan mesin lainnya yang diadakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	50 unit	100 Persen	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	1,200,000,000
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	2 jenis	100 Persen	3,047,486,076	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	3,200,000,000
4.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	82 Poin	30 jenis 20 jenis	100 Persen	3,899,061,168	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	82 Poin	4,000,000,000

